BAB II
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN
TEMPAT KERJA PRAKTEK

2.1 Sejarah singkat perusahaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dinas instansi yang terkait oleh pemerintahan di kota Bandung, sebagai dinas pengelola keadaan daerah tutorial di kota Bandung terutama dikhususkan pada pengelolaan kebudayaan dan pariwisata yang ada di daerah.

Dasar pembentukan Dinas Pariwisata Kota Bandung adalah :

a. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada daerah tingkat I
b. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat nomor 556/Kep.252/Pemda/85 tanggal 26 Februari 1985, tentang penyerahan sebagai urusan pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Kota Bandung.
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 1985, tentang pembentukan Dinas Pariwisata Kota Bandung.
d. Setelah Otonomi Daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kota Bandung.

2.2 Profil Dinas

Nama Dinas : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 277 Bandung
Kegiatan : Mengelola bidang kebudayaan dan pariwisata di lingkungan kota Bandung
Kelembagaan : Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

2.3 Kondisi Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandung

Sumber daya organisasi atau unsur-unsur Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 terdiri dari ;

a. Kepala Dinas
b. Bagian Tata Usaha
c. Bidang Sarana Wisata
d. Bidang Objek Wisata
e. Bidang Seni dan Budaya
f. Bidang Promosi/ Pemasaran Pariwisata

Produk hukum yang mengatur tentang kepariwisataan Kota Bandung adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 (tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan) dan Nomor 11 Tahun 2004 (tentang Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan) sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan dan Keputusan Walikota Nomor 274 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. Dalam Perda tersebut telah diatur mengenai pembinaan melalui proses pendidikan dan pelatihan untuk mendapat sertifikat (sertifikasi), pemberian usaha berupa lisensi, dan pengenaan retribusi. Sementara Peraturan Pemerintah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2004, mengatur tentang Organisasi. Dan pada tanggal 1 Januari 2008 berdasarkan Keputusan Pemerintah Dias Pariwisata berganti nama menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2.4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Adapun Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah :"***MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA TAHUN 2013"*** Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya (*Puseur Budaya*) dan Kota Tujuan Wisata

saat ini merupakan upaya yang secara intens di lakukan pada periode 2004-2009, akan dan perlu dimantapkan keberadaannya pada periode 2009-2013. Tujuannya agar Kota Bandung pada masa yang akan datang benar-benar menjadi Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata yang berdaya saing tinggi sejajar dengan kota-kota lain di dalam dan luar negeri yang selama ini telah menunjukkan kiprahnya di bidang Budaya dan Pariwisata.

Guna mewujudkan Visi di atas, maka dijabarkan dalam beberapa Misi, yaitu sebagai berikut:

a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kepariwisataan yang profesional, berkarakteristik sunda dan berwawasan global;
b. Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian;
c. Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona;
d. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional;
e. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau Kab/kota/negara lain.

2.5 Struktur dan Susunan Organisasi

Pada dasarnya setiap perusahaan/ Dinas mempunyai Struktur Organisasi/ Pengelola sendiri, dari struktur tersebut didapatkan gambaran hubungan antara pimpinan dan bawahan/ karyawan yang sering berinteraksi agar di dapatkan perwujudan tujuan perusahaan yang diinginkan/diharapkan, dengan mengerjakan segala pekerjaan sesuai dengan jobnya masing-masing.

Tetapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, memiliki struktur organisasi terstuktural dengan pemerintaha daerah yang dikepalai oleh Walikota dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Struktur Organisasi merupakan suatu wadah atau tempat orang-orang saling berinteraksi dengan wewenang serta tanggung jawab agar semua kegiatan dapat terlaksana dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Adapun manfaat adanya struktur organisasi, hal ini sudah berarti menjanjikan bahwa antara pimpinan dengan bawahan mempunyai hak dan wewenang yang dilindungi sehingga didalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing didapatkan hasil yang manfaat.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) kota Bandung no.13 tahun 2007 tanggal 4 desember 2007, struktur organisasi/ pengelola dinas kebudayaan dan pariwisata kota Bandung adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas : Drs. PRIANA WIRASAPUTRA.,MM / IV c
Sekretaris : Dra. DIENCE HERLINA,Ak / IV b

KA Sub Bangian Umum dan Kepegawaian
: SIHPIRENANING TYASTUTY / III d
KA Sub Bagian Keuangan dan Program
: Drs. IYAN RUSYANA / III d

Bidang Kesenian dan Kebudayaan
KA Bidang Kesenian dan Kebudayaan
: Dr.Hj.TETET CAHYATI., S.Pd.,MM / III d
KA Seksi Kebudayaan
: Dra. ETTY RS M. Hum / IV a
KA Seksi Kesenian
: Drs. RUDI RUHADI / III d

Bidang Sarana Wisata

KA Bidang Sarana Wisata

: IWAN RUSMAWAN, SE., M.Si / IV a

KA Seksi Pembinaan Sarana Wisata

: Ir.R MUH.NURHUSEIN AFFANDI NADJIB / III d

KA Seksi Pengembangan Sarana Wisata

: Dra. TINI SETIAWATI Z / III d

Bidang Objek Wisata

KA Bidang Objek Wisata

: H. AMAN R S. Sos., Dipl. Hot / IV.a

KA Seksi Pembinaan Objek Wisata

: H. DIDA DAROJAT S.Sos., M. Si / IV a

KA Seksi Pengembangan Objek Wisata

: RENDRA KARYAWAN., S.H., M.Si / IV a

Bidang Pemasaran Pariwisata

KA Bidang Pemasaran Pariwisata

: Dra. Hj. IIM DEWI MULYANI / IV a

KA Seksi Promosi Pariwisata

: Drs. HATTA / III d

KA Seksi Kerjasama Wisata

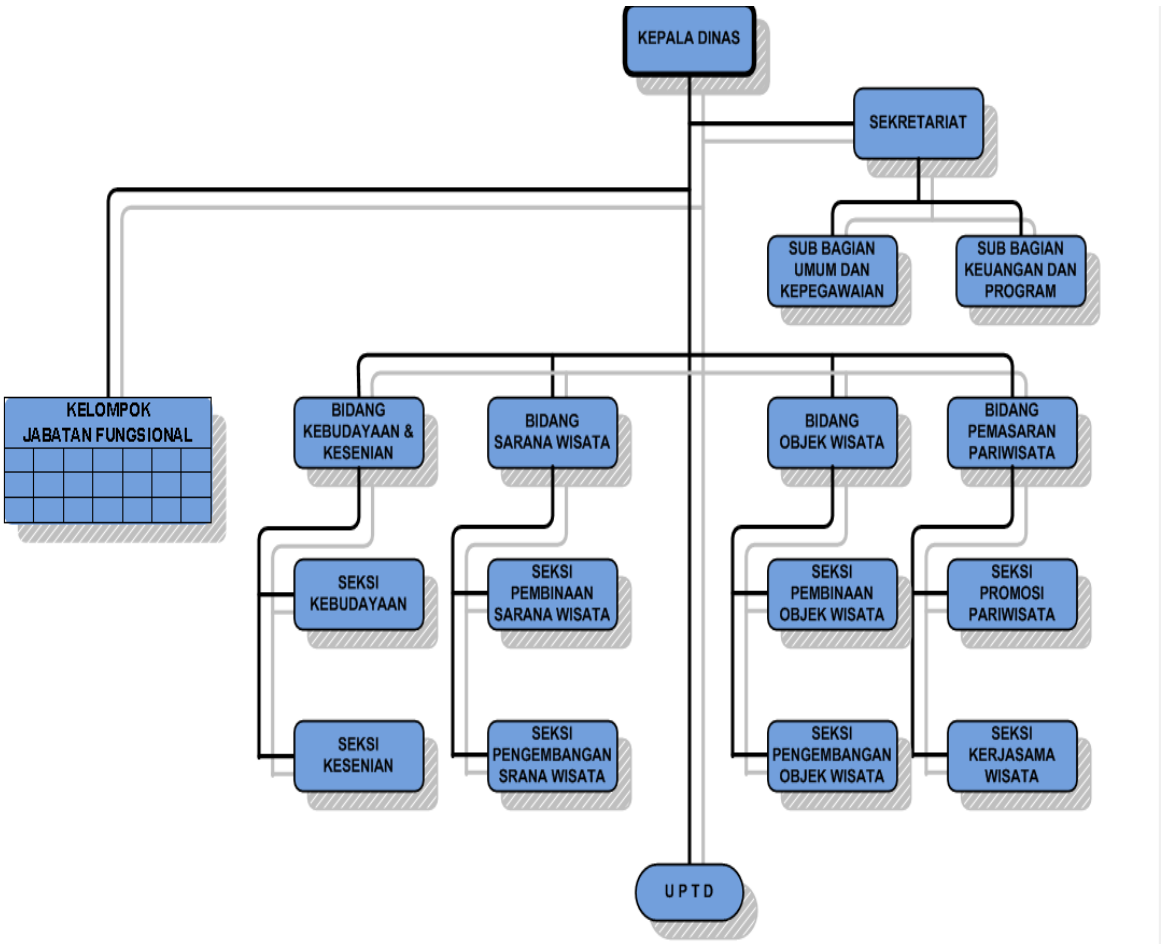
: Dra. HJ. YETTY HARTATI / III d

Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD)

KA UPTD : Hj. SRI SUSIAGAWATI, SE / III c

KA Sub Bagian UPTD : ATY ATIPAH,S.Ip / III b

2.6 Bentuk Struktur Organisasi



Gambar 1 : Struktur Organisasi DISBUDPAR